

# **PENGARUH FAKTOR KEPRILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER)**

**Ayu Tinis Kaulia, Dr. Dwi Cahyono, MSi, Ak, Didik Eko Pramono, SE. MSi, Ak**

Program Studi AKuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Jember

## **ABSTRACT**

*The initial survey conducted by the author is the micro business service, tourism and social services department in Jember district, from which it is known that the usefulness of the regional financial accounting system is still not optimal. So the purpose of this study is to analyze whether training, clarity of purpose and superiors support influence the usefulness of the regional financial accounting system. The population of this study is all SKPD in Jember district, east java province. The sample taken is a sample of respondents who are appropriate from the criteria and the sample needed is 106 respondents from 53 objects. The method of data collection uses a questionnaire. The data analysis method used is descriptive analysis. The result of these studies indicate that: 1. There is positive influence from training factors on the usefulness of SAKD. 2. There is a positive influence from the clarity of the purpose of the use of SAKD. 3. There is a positive influence from the factor of superior support for the use of SAKD. Based on the result of the study, it can be concluded that behavioral factors such as training, clarity of purpose and superiors support have an important role to improve the performance of administrative staff in understanding more about the use of SAKD. So that suggestions for employers and agencies to further improve training, clarity of purpose and superiors support to increase the use of SAKD.*

*Keywords: Boss support, Clarity of Purpose, Training and Regional Financial Accounting System.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek – aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek – aspek tersebut yaitu pengaruh organisasi terhadap manusia dan pengaruh manusia terhadap organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Kayati : 2016) dalam bukunya (Timotius : 2018). Penerapan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah yaitu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No.59/PMK.6/205 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka system akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perubahan atas permendagri No. 13 tahun 2006 adalah pasal 232 yang isinya mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah agar dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang sesuai standart dan berkualitas.

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 yang kini telah diperbaharui oleh Permendagri No.21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer. Proses akuntan tersebut akan didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar dan jika diperlukan maka ditambah dengan buku besar pembantu, sehingga terlihat jelas bahwa sistem akuntansi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa factor organisasional seperti pelatihan, kejelasan tujuan serta dukungan atasan, berpengaruh positif terhadap implementasi suatu inovasi system maupun perubahan model akuntansi manajemen (Latifah dn Sabeni : 2007).

Objek yang akan diteliti dikabupaten Jember yang diketahui bahwa tentang kegunaan sistem akuntansi keuangan yang meliputi faktor tingkat kepuasan pelatihan, tingkat pemahaman karyawan terhadap kejelasan tujuan dan tingkat pemahaman karyawan terhadap dukungan atasan masih terbilang kurang. Sehingga disitu peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang Faktor Keprilakuan organisasi dalam mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Dimana tempat yang dijadikan obyek adalah pada kabupaten Jember, yang mempunyai masalah karyawan sebagian banyak tidak mengerti atau tidak paham mengenai kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Oleh karena itu peneliti melakukan sebuah replikasi penelitian yang telah dilakukan (Kayati : 2016).

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah berpengaruh positif pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
2. Apakah berpengaruh positif kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
3. Apakah berpengaruh positif dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?

### **1.3. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pelatihan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui apakah kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui apakah dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

### **1.4. Manfaat**

Manfaat penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan pemikiran untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah yang sudah dituangkan dalam peraturan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah harus transparansi, efektif. Efisien dan akuntabilitas dan konsep – konsep tentang pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan sebagai dukungan dalam peningkatan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Jember

#### **2. Manfaat Praktis**

Adapun secara praktis manfaat dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peneliti  
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dengan mengaplikasikan teori yang sudah didapat selama studi di perguruan tinggi.
2. Manfaat bagi pemerintah  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang saat itu ditetapkan.
3. Manfaat bagi praktisi Akuntansi Sektor Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam mengembangkan profesinya disektor public.

#### 4. Manfaat bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dijadikan referensi dalam penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh factor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan system akuntansi keuangan daerah.

### 3. Manfaat bagi pembaca

Dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Landasan Teori

#### 2.1.1. *Achievement Motivation Models*

*Achievement motivation models* menjelaskan dan memprediksi perilaku dan kinerja berdasarkan kebutuhan seseorang untuk prestasi, kekuasaan atau afiliasi. Mc Clelland membagi motif seseorang dalam berbagai derajat kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan untuk prestasi, kekuasaan dan afiliasi. Kebutuhan prestasi menurut (Kayati : 2016) adalah keinginan untuk mencapai sesuatu yang sulit, mencapai standar keberhasilan yang tinggi, menguasai tugas – tugas yang kompleks, dan mengungguli orang lain. Kebutuhan untuk kekuasaan atau power menurut Mc Clelland dalam (Moore Grabsch dan Rooster, 2000) merupakan suatu keprihatinan karena kebutuhan kekuasaan merupakan control atau cara mempengaruhi seseorang. Implikasi teori yang dapat dijelaskan adalah, jika karyawan diberikan pelatihan maka akan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kegunaan system akuntansi keuangan daerah. Karyawan memiliki kebutuhan prestasi dalam mencapai tujuan perusahaan, maka tidak hanya pelatihan yang diberikan kejelasan tujuan juga mempengaruhi karyawan untuk mencapai prestasi dalam mencapai tujuan. Teori ini memprediksikan perilaku dan kinerja karyawan berdasarkan kebutuhan untuk mendapatkan prestasi.

#### 2.1.2. *Model Path Goal*

Teori *Path Goal* atau *House's path goals theory* dikembangkan oleh Roberth J. House dan berakar pada teori harapan (dipengaruhi oleh model teori yang dikembangkan Victor Vroom dan juga Martin G. Evans). Teori ini didasarkan pada premis bahwa persepsi karyawan tentang harapan antara usaha dan kinerja sangat dipengaruhi oleh perilaku seorang pemimpin. Para pemimpin membantu bawahan terhadap pemenuhan akan penghargaan dengan memperjelas tujuan dan menghilangkan hambatan kinerja.

### 2.2. Sistem AKuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Akuntansi adalah suatu sistem. Menurut PP 71 tahun 2010 akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem – subsistem atau kesatuan yang terdiri atas kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Menurut permendagri nomor 64 tahun 2013 standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tahap – tahap dalam siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi, jurnal, posting ke buku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo, membuat laporan keuangan, jurnal penutupan, dan neraca setelah penutupan. Laporan keuangan, sesuai dengan siklus akuntansi, setelah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian disusun laporan – laporan

keuangan dengan mengambil data neraca saldo setelah penyesuaian. Maka buatlah: Neraca, laporan Realisasi Anggaran (LRA) , Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas laporan Keuangan (CALK).

Perubahan sistem akuntansi Pemerintahan Daerah, (Yulistia dkk : 2017) terdapat karakteristik pelaksanaan pemerintah yang baik yaitu :

#### 1. Akuntabilitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari setiap kegiatan penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### 2. Keterbukaan/Transparansi

Merupakan suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan – keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan public.

#### 3. Ketaatan pada Hukum

Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah dengan demikian dengan ketaatan social, ketaatan social manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi – sanksi social yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan,

#### 4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana konsekuensi demokrasi adalah penyediaan ruang bagi partisipasi public yang seluas – luasnya. Partisipasi public dalam proses pengambilan kebijakan yang mengikat seluruh warga adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat. Di Negara – Negara demokrasi, partisipasi warga dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim. Partisipasi public dalam proses kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari – hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah.

Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 terdiri dari:

1. Laporan realisasi anggaran disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/deficit LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggara yang masing – masing diperandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunal SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKP, koreksi dan SAL akhir.
3. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan operasional disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan –LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan arus kas disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan oinformasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
6. Laporan perubahan ekuitas disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/deficit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
7. Catatan atas laporan keuangan disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

### 2.3. Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif efisien, dan akuntabel. Indikator yang digunakan dalam mengukur kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut (Kayati : 2016) adalah sebagai berikut:

1. *Validity*, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi.
2. *Reliability*, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya.
3. *Efisien*, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya.
4. *Efektif*, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal.

### 2.4. Faktor Keprilakuan

Menurut (Robbins, 2011) Perilaku Organisasi juga merupakan bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Menurut (Ahmad : 2015), faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Dukungan Atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, Kejelasan Tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi, dan Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem.

Pelatihan berkaitan dengan implementasi, desain dan penerapan SAKD yang dapat memberikan mekanisme bagi pengguna untuk memahami dan menerima dasar dari SAKD. Menurut (Febriana : 2016), untuk mencapai program pelatihan, maka harus memperhatikan sasaran yang jelas, memakai tolak ukur terhadap hasil yang dicapai. Pelatihan ditunjukkan kepada semua karyawan, baik karyawan lama ataupun karyawan baru, bagi karyawan baru pelatihan dilakukan guna meningkatkan wawasan karyawan untuk dapat mengerti pengoperasian peralatan atau mesin, kepada siapa mereka bertanggungjawab, dan bagaimana cara mengatasi konflik dalam organisasi, sedangkan bagi karyawan lama gunanya untuk lebih meningkatkan hasil pekerjaan baik sekarang atau yang akan datang, serta dapat memperbaiki efisiensi dan efektifitas kerja karyawan untuk mencapai tujuannya.

Kejelasan tujuan adalah penting untuk diingat bahwa orang – orang di dalam organisasi bertanggung jawab untuk menentukan sasaran dan menetapkan tujuan. Orang – orang dalam organisasi juga bertanggung jawab atau pencapaian sasaran dan tujuan tersebut. Fase penetapan tujuan dan perencanaan penuh dengan kekurangan dalam perilaku. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan dari anggota organisasi yang dominan, yang secara kolektif mempunyai kendali yang mencakupi atas sumber daya organisasi untuk membuat komitmen atas arahnya tertentu atau untuk menahannya dari yang lain. Kejelasan tujuan dalam organisasi dapat menentukan suatu keberhasilan sistem, karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, akan lebih dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki.

Menurut Nasution 1994 dalam (Latifah : 2007) . Dukungan atasan dapat diartikan sebagai keterlibatan atasan dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Dukungan manajemen puncak dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Atasan dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam mewujudkan efektivitas suatu sistem.

Ciri – ciri atasan yang baik dapat memberikan dukungan kepada karyawannya dalam suatu organisasi adalah:

1. Mempunyai kemampuan melebihi orang lain dan harus mempunyai inisiatif untuk memberikan masukan yang baik kepada karyawannya.
2. Mempunyai rasa tanggung jawab yang besar.
3. Bekerja keras sehingga dapat memberikan contoh atau motivasi kepada karyawan.
4. Pandai bergaul dan dapat mengenal semua karyawan dengan baik.
5. Memberikan contoh bekerja dan semangat kepada bawahan atau karyawan.
6. Memiliki rasa integritas dan rasa bersatu padu dengan kelompok yang ada dalam organisasi.

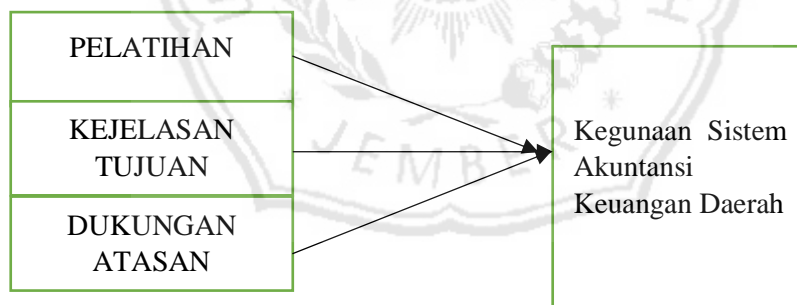
## 2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan (Yulistia dkk : 2017) pada pemerintah daerah Sumatera Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan hubungan positif antara dukungan atasan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, namun hasil yang berbeda ditunjukkan dari hubungan negative antara pelatihan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hal yang sama juga dilihat dari hasil pengujian kejelasan tujuan dengan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, karena nilai critical ratio (CR) menunjukkan nilai yang negative.

Penelitian oleh (Caecilia Henny Setya Wati dan semuel Batlajery : 2015) tentang Faktor Keprilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik Kongnitif Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Merauke yang menunjukkan bahwa hanya pengguna dukungan atasan dan konflik kongnitif memiliki pengaruh positif dan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Pelatihan dan kejelasan tujuan memiliki pengaruh positif pada konflik kongnitif.

Penelitian oleh (Novie Astuti : 2017) tentang Pengaruh Keprilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem akuntansi Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Kediri Jawa Timur. Menunjukkan hasil bahwa dari faktor organisasi yang di uji fektor keprilakuan organisasi yang meliputi hanya dukungan atasan dan kejelasan tujuan yang berpengaruh positif pada sistem akuntansi keuangan daerah sedangkan pelatihan berpengaruh negatif.

## 2.6. Kerangka Berfikir



## 2.7. Hipotesis

### 2.7.1. Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut (Kayati 2016) didalam penelitiannya tentang pengaruh faktor keprilakuan organisasi terhadap implementasi SAKD yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif untuk meningkatkan kegunaan SAKD. Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah :

H1 : Terdapat pengaruh positif pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada kabupaten Jember

Dalam penelitian (Nurlaila dan Rahmawati : 2010) dalam (Kayati : 2016) menyatakan bahwa tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif kejelasan tujuan dengan kegunaan SAKD. Sejalan dengan hasil penelitian oleh (Latifah dan Sabeni : 2007) yang memperoleh hasil bahwa tidak berhasil membuktikan adanya hubungan positif kejelasan tujuan dengan kegunaan SAKD. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mranani dan Lestiorini (2011) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh positif

kejelasan tujuan terhadap SAKD. Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah :

H2 : Terdapat pengaruh positif kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada kabupaten Jember

Menurut (Novie Astuti :2017) dan Penelitian (Latifah dan SABeni :2007) menyatakan bahwa dukungan atasan berpengaruh untuk meningkatkan kegunaan SAKD. Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah:

H3 : Terdapat pengaruh positif dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di kabupaten Jember.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Desain Penelitian**

Jenis dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data *primer*, data *primer* adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan cara yaitu melakukan penyebaran angket *kuesioner* yang berisikan beberapa pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dan akan diserahkan kepada responden, sedang jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis. Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variable dengan angka dan melakukan analisis data menggunakan prosedur statistic dengan bantuan program SPSS.

#### **3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

##### **3.2.1. Populasi**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil pada pegawai yang berprofesi akuntansi atau pada bagian bandahara/administrasi dimana objek yang akan diteliti adalah dinas – dinas kabupaten jember dan kecamatan yang ada di kabupaten Jember. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Jember meliputi 21 Dinas, 31 Kecamatan, 6 Badan, 3 RSD, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 8 Bagian, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat. Jadi total sampel SKPD yang akan dijadikan sampel penelitian ini berjumlah 53 SKPD dinas dan kecamatan dengan total 106 kuesioner/angket.

##### **3.2.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel pada penelitian ini diambil dari Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kewenangan bagian keuangan dan administrasi pada Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 61 orang/responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *non probability sampling* dengan teknik *purpose sampling*. *Purpose sampling* atau pengambilan sampel bertujuan mendapatkan informasi yang relevan. Seseorang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.

Kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada masing – masing Dinas dan Kecamatan.
2. Memiliki kerja minimal 1 tahun pada periode penyusunan laporan keuangan.

Metode pengambilan data melalui angket atau kuesioner. Metode angket digunakan untuk mengumpulkan data variabel kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan satuan kerja perangkat daerah antar kecamatan dan kantor dinas kabupaten Jember. Karena data diolah dengan SPSS maka diperlukan uji instrument. Uji instrument yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Dapat dikatakan reliabel apabila jawaban responden atau seseorang tersebut adalah konsisten dari waktu kewaktu.

#### **3.3. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda.

#### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Abdiel : 2015) analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran dari nilai minimum, nilai maksimum, rata – rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing – masing variabel penelitian yaitu kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (Y), pelatihan (X), kejelasan tujuan (X2), dukungan atasan (X3).

#### 2. Analisis Regresi Berganda

##### a. Uji asumsi klasik:

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Ghozali : 2011).

##### b. Uji Normalitas

Pengujian normalitas menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitasnya  $>0,05$ .

##### c. Uji Linieritas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris dapat dilihat pada output SPSS dalam kolom Linearity pada ANOVA Table pada taraf signifikansi 0,05.

##### d. Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi adalah sebagai berikut :

1. Nilai  $R^2$  yang menghasilkan suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel – variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi antar variabel – variabel independen. Jika ada korelasi yang cukup tinggi maka model regresi tersebut multikolinieritas.
3. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Varianc inflation factor*). Jika nilai VIF lebih besar dari 1 dan kurang dari 10 sedangkan toleransinya kurang dari 1 maka model regresi tidak mengandung multikolinieritas.
- e. Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Kayati : 2016). Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melakukan Uji Park. Jika koefisien parameter variabel independen atau nilai signifikansinya  $>0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Abdiel : 2015).

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil pada pegawai yang berprofesi akuntansi atau pada bagian bendahara/administrasi dimana objek yang akan diteliti adalah dinas – dinas, dan kecamatan yang ada di kabupaten Jember. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Jember meliputi 21 Dinas, 31 Kecamatan, 6 Badan, 3 RSD, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 8 Bagian, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat. Jadi total sampel SKPD yang akan dijadikan sampel penelitian ini berjumlah 53 SKPD dinas dan kecamatan dengan total 106 kuesioner/angket. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup atau memenuhi kriteria untuk dikatakan reliabel yaitu di atas 0,600, sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. Standart alpha 0,600 menurut teori yang bersumber dalam bukunya (V. Wiratna Sujarweni : 2014) yang menjelaskan bahwa nilai Cronbach Alpha  $> 0,600$  maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten. Hasil uji normalitas ternyata semua data terdistribusi secara normal, sebaran data berada di sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Dari hasil uji heterokedastisitas yang telah dilakukan ternyata titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka



0 (nol) pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas pada model regresi yang dibuat, dengan kata lain menerima hipotesis homoskedastisitas.

Pengujian Hipotesis uji F menyatakan bahwa bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $17,869 > 2,4626$ ) maka pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah pada tingkat signifikan 5%, dalam hal ini  $H_0$  ditolak. Sehingga, hipotesis yang menyatakan pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah terbukti kebenarannya ( $H_a$  diterima). Sedangkan uji t menyatakan bahwa pelatihan mempunyai nilai signifikansi hitung sebesar 0,040 dan lebih besar dari 0,05 dan t hitung ( $2,077$ )  $>$  t tabel ( $1,6602$ ) yang berarti bahwa hipotesis pelatihan mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah diterima. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelatihan mempengaruhi sistem akuntansi keuangan daerah yang berarti semakin baik pelatihan akan berdampak pada semakin baiknya sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil uji kejelasan tujuan mempunyai nilai signifikansi hitung sebesar 0,010 dan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung ( $2,611$ )  $>$  t tabel ( $1,6602$ ) yang berarti bahwa hipotesis kejelasan tujuan mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah diterima. Hasil uji dukungan atasan mempunyai nilai signifikansi hitung sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung ( $4,670$ )  $>$  t tabel ( $1,6602$ ) yang berarti bahwa hipotesis dukungan atasan mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah diterima.

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,587. Hal ini berarti 58,7% variasi variabel sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan oleh pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan, sedangkan sisanya sebesar 0,413 atau 41,3% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini seperti kompetensi SDM dan lainnya.

#### **4.7 Pembahasan**

a. Pengaruh pelatihan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh pelatihan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,040 dan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung ( $2,077$ )  $>$  t tabel ( $1,6602$ ) yang berarti hipotesis diterima.

b. Pengaruh kejelasan tujuan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh kejelasan tujuan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,010 dan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung ( $2,611$ )  $>$  t tabel ( $1,6602$ ) yang berarti hipotesis diterima.

c. Pengaruh dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,005 dan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung ( $2,842$ )  $>$  t tabel ( $1,6602$ ) yang berarti hipotesis diterima. Pengujian secara statistik ini membuktikan bahwa adanya pengaruh dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

d. Pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil pengujian hipotesis dari ketiga variabel tersebut telah membuktikan bahwa pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan berpengaruh secara simultan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05 dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $17,869 > 2,4626$ ) yang berarti hipotesis diterima. Artinya bahwa ada pengaruh secara simultan pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah

#### **5. PENUTUP**

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pelatihan terhadap kegunaan SAKD. Artinya, semakin baik pelatihan mengenai kegunaan sistem akuntansi keuangan yang diberikan maka dapat memberikan peningkatan dalam kegunaan SAKD.
2. Terdapat pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan SAKD. Artinya, semakin baik kejelasan tujuan yang diberikan maka akan dapat memberikan peningkatan terhadap kegunaan SAKD.
3. Terdapat pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan SAKD. Artinya, semakin baik dukungan atasan yang diberikan maka akan dapat memberikan peningkatan terhadap kegunaan SAKD.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdiel Janitra, 2015, *Pengaruh Faktor Keprilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 6-7
- Ahmad AL-Hiyri, Mohammed Hamood AL-MAshregy, Nik Kamariah Nik Mat, Jamal Mohammeds mail alekam, 2013, "Factors That Affect Accounting Information System Implementation and Accounting Information Quality A Survey in University Utara Malaysia", *American Journal of Economis*. Vol 3. P 27-31
- Ahmad Nur Solichin, 2015, *Pengaruh Faktor Keprilakuan Organisasi Terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Kabupaten Grobongan Jawa Tengah*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Andira Dewanti, 2015, *Pengaruh Faktor Keprilakuan Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 5
- Ataina Hidayati, 2002, "Perkembangan Penelitian Akuntansi Keprilakuan Berbagai Teori Dan Pendekatan Yang Melandasi", *Jurnal Akuntansi*, V6 No 2.
- Caecilian Henny Setya Wati, Samuel Batlajery, 2015, "Faktor Keprilkauan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, Vol 6 No 1.
- Cyntia Carolina, 2013, *Pengaruh Kejelasan Tujuan Dan Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*, Skripsi Akuntansi Universitas Negeri Padang. 3, 5.
- Erwinton Putra Antonius Tarigan, Lastia Nurtanzila, 2013, "Standar AKuntansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol 17 No.1. 30-33
- Febriana F. Albugis, 2016, "Penerapan Sistem AKuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabel Keuangan Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Emba*. Vol 4 No 3.
- Kayati, 2016, *Pengaruh Faktor Keprilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*, Skripsi Fakultas Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
- Lyna LATifah, Arifin Sabeni, 2007, "Faktor Keprilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah", *Simposium Akuntansi*. ASPP-13. 6-7
- Muji Mranani, Beti Lestiorini, 2011, "Faktor Keprilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik Kongnitif Dan Konflik Afentif Sebagai Intervening", *Jurnal Ekonomi*. Vol 10 N0.3.
- Novie Astuti, 2017, "Pengaruh FAKtor Keprilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Kediri Jawa Timur", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol 6 No 1. 21
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaam Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Prosedur Sistem Akuntansi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri N0.59 Tahun 2007 tentang Akuntansi Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2011 tentang istem Akuntansi Keuangan Daerah  
Peraturan Pemerintah Rakyat Indonesia Nomor . 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Jabatan PNS  
Sigit Indra Lesmana, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan  
Wajib DI Indonesia, Penulisan Tesis, Universitas Sebelas Maret 2010.  
Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  
Daerah Republik Indonesia.  
Republic Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat  
dan Pemerintah Daerah Republik Indonesia.  
Tan Ming Kuang, See Tin, 2010, “Analisis Perkembangan Riset Akuntansi Keprilakuan Study Pada  
Jurnal Behavioral Reseach In Accounting”, *Jurnal Akuntansi*. Vol 2 No 2.  
Yulistia, Novi Yanti, Ika Purwasih, 2017, “Analisis Faktor Keprilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan  
Sistem Akuntansi Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi SumateraBarat”,  
*Jurnal Benevita*. Vol 2. 183

